

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terus berkembang baik dalam segi kehidupan masyarakat maupun dari segi tata ruangnya. Yogyakarta dikenal luas sebagai kota Pendidikan tinggi serta salah satu pusat kebudayaan Jawa. Begitu banyak obyek wisata yang ada di kota Yogyakarta ini dan menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata andalan masing-masing Kabupaten di Yogyakarta. Tempat wisata tersebut banyak dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan, ada yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara.

Banyaknya wisatawan yang mengunjungi kota Yogyakarta membuat penerimaan pendapatan Kota Yogyakarta meningkat. Pembangunan ekonomi daerah khususnya pemerintah kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah tersebut diharapkan bisa lebih mengetahui potensinya dan apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki

kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata (Riady, 2010).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah bisa ditempuh suatu kebijakan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Terdapat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para pemerintah yang telah ditunjuk untuk memimpin sebuah Negara dan sebagai masyarakat kita seharusnya menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan ayat di atas, dikatakan bahwa setiap umat manusia terutama kaum muslim ditugaskan dengan tugas yang sama yaitu menjadi seorang Khafilah atau pemimpin. Pemimpin yang di maksud adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri, pemimpin atas jeluarganya, maupun pemimpin atas daerah dan negaranya. Kita sebagai masyarakat haruslah taat pada pemimpin yang didasarkan oleh ketaatan pada Allah, seorang pemimpin harus ditaati selama ia mengarahkan kepada hal yang berada pada jalan Allah.

Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek sangat baik untuk dikembangkan. Pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang bisa diandalkan.

Salah satu pajak daerah yang berpotensi semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga bisa menunjang berkembangnya bisnis pariwisata adalah pajak hotel. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk didalamnya ada Pajak Hotel, pengertian Pajak Hotel menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun

2009 pasal ayat 20 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Penelitian ini berjudul “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1989-2019” penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi variabel Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, PDRB dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel.

Berikut ini merupakan realisasi penerimaan pajak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.1.
Penerimaan Pajak Hotel DIY Tahun 2017 – 2019

Tahun	Pajak Hotel (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)
2017	216.568	-
2018	251.723	16,23
2019	284.165	12,88

Sumber: bappeda.jogjaprovo.go.id

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pajak hotel terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pajak hotel mengalami kenaikan tinggi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 35.155 juta Rupiah. Presentase Pertumbuhan Pajak Hotel dari pada tahun 2018 adalah sebesar 16,23% dan pada tahun 2019 sebesar 12,88%. Realisasi pajak daerah harus terus menerus dimaksimalkan karena pajak merupakan elemen yang jangkauannya paling luas dan dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah.

Realisasi penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor yang pertama adalah jumlah hotel. Keadaan hotel yang terdapat di DIY memberikan keuntungan untuk Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk pengguna jasa penginapan/hotel, memberikan keuntungan bagi pemerintah. Apabila jumlah hotel bertambah maka diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak hotel juga. Perkembangan jumlah hotel yang ada di DIY dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup berfluktuasi. Berikut ini adalah data jumlah hotel yang ada di DIY bisa dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

TABEL 1.2.

Banyaknya Jumlah Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2019

Tahun	Jumlah Hotel
2017	438
2018	580
2019	573

Sumber: bappeda.jogjaprov.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah hotel yang ada di DIY pada tahun 2017 hingga tahun 2019 relatif mengalami fluktuasi. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018 jumlah hotel di DIY mengalami kenaikan sebesar 142 hotel. Sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 banyaknya jumlah hotel di DIY mengalami penurunan sebesar 7 hotel. Perubahan jumlah hotel yang terjadi dari tahun ke tahun membuat peningkatan jumlah penerimaan pajak oleh Pemerintah DIY.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut. Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 1 menyebutkan bahwa wisatawan adalah

orang yang melakukan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kunjungan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata akan memberikan dampak terhadap suatu daerah tersebut. Wisatawan yang sedang berkunjung ke suatu daerah akan membutuhkan barang atau jasa di wilayah tersebut. Para wisatawan juga pastinya akan mengunjungi objek wisata lebih dari 1 tujuan. Berikut ini adalah data jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY bisa dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini:

TABEL 1.3.
Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke DIY (Menggunakan jasa hotel bintang dan non bintang)

Tahun	Jumlah Wisatawan
2017	5.347.303
2018	4.752.351
2019	4.589.514

Sumber : bappeda.jogjapro. gov. id

Pada tabel 1.3 di atas bisa kita lihat bahwa tingkat wisatawan yang berasal dari dalam negeri maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung di DIY mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat mempengaruhi penerimaan PDRB DIY dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah.

PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel. PDRB merupakan suatu

indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Peningkatan PDRB berkaitan erat dengan dampak dari meningkatnya aktivitas ekonomi. Meningkatnya standar hidup masyarakat maka golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi akan semakin meningkat juga, sehingga hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah termasuk penerimaan pajak hotel juga.

TABEL 1.4.
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Tahun	PDRB
2017	92.300.243,90
2018	98.024.014,30
2019	104.487.543,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Dapat dilihat pada tabel 1.4 jumlah penerimaan PDRB konstan di DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 hanya berkisar 92.300.243,90 juta rupiah kemudian mengalami kenaikan sampai dengan 104.487.543,80 juta rupiah pada tahun 2019.

Faktor yang terakhir yaitu inflasi, factor ini juga sangat berpengaruh untuk penerimaan pajak hotel. Laju inflasi mempunyai dampak yang akan menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di hotel, serta berakibat pada keuntungan yang di peroleh pengelola hotel sehingga penerimaan pajak hotel akan menurun.

TABEL 1.5.
Laju Inflasi

Tahun	Laju Inflasi (%)
2017	4,20
2018	2,66
2019	2,77

Sumber: *bappeda.jogjaprovo.go.id*

Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa laju inflasi tahun 2017 sebesar 4,20% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 2,77%. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2017 daya beli masyarakat berkurang sehingga menyebabkan berkurangnya minat seseorang menginap di hotel sehingga penerimaan pajak hotel menurun. Pada tahun 2019 laju inflasi berkurang sehingga daya beli masyarakat Kembali meningkat dan menyebabkan penerimaan pajak hotel meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alisman (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat”. Teknik analisis data menggunakan data sekunder dalam kurun waktu 7 tahun. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda, Korelasi, Uji t dan Uji F. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerimaan pajak hotel di Aceh barat secara signifikan dipengaruhi pengunjung hotel dan jumlah hotel di Kabupaten Aceh Barat. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan analisis regresi berganda sedangkan peneliti menggunakan *Error Correction Model (ECM)*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifqy Sabatini (2012) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang”. Teknik analisis data menggunakan data sekunder

dan data deret berkala (*time series*) dengan runtut waktu selama lima belas tahun yaitu dari tahun 1996-2010. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Linier Regression Method*) atau *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar dan tarif kamar rata-rata signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan PDRB dan jumlah wisatawan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan OLS sedangkan peneliti menggunakan metode ECM. Perbedaan yang lain adalah variabel yang digunakan tingkat kamar hunian hotel dan tarif kamar rata-rata sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh A. Azinar Muqaddas R. dan A. Karim Saleh dan Madris (2010) dengan judul “Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Parepare”. Teknik analisis data menggunakan data sekunder runtut waktu (*time series*), data dianalisis dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengunjung hotel yang menginap dan mempergunakan fasilitas hotel dengan pembayaran dan tarif rata-rata kamar hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel yang digunakan yaitu tarif kamar dan jumlah pengunjung hotel sedangkan peneliti menggunakan variabel jumlah hotel, jumlah wisatawan, PDRB dan inflasi. Perbedaan yang lain adalah metode yang digunakan yaitu OLS sedangkan peneliti menggunakan ECM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novia Leoni Supit, Anderson G. Kumenaung dan Richard L.H. Tumilaar (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado”. Teknik analisis data menggunakan data sekunder dari tahun 2001-2014 dan di analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado sedangkan jumlah wisatawan yang menginap di hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak hotel di Kota Manado. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu OLS sedangkan peneliti menggunakan ECM serta variabel yang digunakan hanya ada 2 variabel yaitu jumlah wisatawan dan jumlah hotel. Sedangkan peneliti menggunakan variabel jumlah hotel, jumlah wisatawan, PDRB dan inflasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat diuraikan hubungan antara Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, PDRB dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan berkeinginan untuk mengetahui lebih dalam hubungan antara variabel yang dipilih terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019?
4. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019.
2. Mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019.
3. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019.
4. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu:

1. Bidang Teoritis/Akademis

Secara Teoritis/Akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta serta potensi pengembangannya. Penelitian ini juga dapat menjadi tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dengan menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM).

2. Bidang Praktis

- a. Bagi Pelaku Ekonomi, Lembaga Pemerintah atau Swasta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dalam mengambil keputusan.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas pengetahuan terhadap faktor-faktor penerimaan pajak hotel dengan metode *Error Correction Model* (ECM).

- c. Bagi Akademik dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel serta sebagai referensi bagi peneliti lain yang memerlukan.